

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik Cetakan ke-2*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila Press, 2009.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Badudu and Sutan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet. Kedua*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Media Buana, 2022.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prasetyo, Teguh and Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.

Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*. Bandung:

P.T Alumni, 2006.

Samekto, F. X. Adji. *Penelitian Hukum dalam Aliran Legal Positivisme*.

Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.

Sianturi, S.R, dan E.Y. Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Storia

Grafika, 2002.

Situmorang, Victor M and Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta*

Catatan Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum Cetakan ke 12. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:

Politeia, 1998.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*.

Jakarta: Storia Grafika, 2018.

Subekti, R. and Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradya

Paramita, 1986.

_____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.

- Sunardi, Danny Tanuwijaya, and Abdul Wahid, *Republik “Kaum Tikus”*; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM Cetakan I*. Jakarta: Edsa Mahkota, 2005.
- Suteki and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Syahrani, Ridhuan. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Edisi 1*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru cetakan ulang 2019.

B. Jurnal

- Abdi Dharma, “Kepastian Hukum Terhadap Proses Pembuatan Akta Jual Beli Yang Menyimpang Dari Ketentuan PP 24/1997(Studi Di Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur),” *Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* 2 (2019)
- Ade Aktanotaria, Anriz Nazaruddin Halim, Tofik Yanuar Chandra, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, No. 3, (September 2025), E-ISSN 2774-8863.

Andien Hasea Sihotang, Jacobus Jopie Gilalo, Sudiman Sihotang, “Kedudukan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Menggunakan Identitas Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Kalimah Tauhid* 3, No. 10, (2024), e-ISSN 2963-590X.

Annisa, “Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, *Fahum.umsu.ac.id*, 2025.

Antonius Alreza Pahlevi, “Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya”, *Hukumonline.com*, 2020.

Antonius Ndruru, Dikir Dakhi, and Lakadodo Laia, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal Education and Development* 13, No. 1, (Januari, 2025;., DOI : 10.37081/ed.v13i1.6905.

Astuti, Siska Widia. “Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017).”, *Jurnal Indonesian Notary* 2, no. 30, 2020. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/30>

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen”, *Hukumonline.com*, 2024.

Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso, dan Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan

Jeffrey Z. Rubin.” *Jurnal Notarius* 13, no. 2, 2020.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

Devi Pramitha Kurniasari, Studi Komparasi Kewenangan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pengawasan, Universitas Airlangga, 2016. <https://repository.unair.ac.id/30656/>

Dhian Ekasari. “Analisis Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa Di Kabupaten Magetan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
https://repository.unissula.ac.id/22554/10/Magister%20Kenotariatan_21301900021_fullpdf.pdf.

Erizka Permatasari, “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen,” *Hukumonline.com*, 2022.

Erlangga Kurniawan. “Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana.”, *Ercolaw.com*, 2025.

Ernanto Arisandi, “Asas Tunai dan Terang dalam Jual Beli Tanah.”, *djkn.kemenkeu.go.id*, 2022.

Fatimah, Priska Talitha, Winanto Wiryomartani, dan Surastini Fitriasih. “Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018).” *Jurnal Indonesian Notary* 2, no. 23, 2020. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/23>.

Gilang Romadhan, “Cara Mengurus Akta Jual Beli Tanah Dan Syarat Dokumen Yang Dibutuhkan,” *Kompastv.com*, 2023.

Handojo Djoko Waloejo, Ana Silviana, Khairul Anami, “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah,” *Law, Development & Justice Review* 3 (2020), <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.9523>.

Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi* 15, no.4, (Desember 2018), <https://doi.org/10.31078/jk1546>.

Irwan Gomulja. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/Tun/2013).” Universitas Narotama, 2020.
<http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1145>.

Jon Panggabean. “Pertanggung Jawaban Pidana Notaris/Ppat Terhadap Akta Autentik Yang Dipalsukan.” *Pengacarasumatera.com*, June 7, 2025.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* 1, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Jumiati dan Ndaru Satrio, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP”, *Jurnal LEX Certa 1*, No. 1, 2016.

Muhammad, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum 7*, No. 2, (Agustus 2019). ISSN: 2337-4667.

Nesha Sakina and Budi Santoso, “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu”, *Jurnal Notarius 17*, No. 3, (Desember 2024), <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.47166>.

Ni Ketut Rasita Dewi, “Mengenal Lebih Dekat Mengenai IKD,” *Disdukcapil.bulelengkab.go.id*, 2024.

Novanto, Brian Shella, “Meminimalisir Terjadinya Pemalsuan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Menggunakan Barcode pada Minuta Akta PPAT”, *Jurnal Acta Comitatus 9*, No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p11>.

Nur Aisyah Pungky Rahmawati dan Syaifuddin Zuhdi, “Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2024). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/123319>

Pande Komang Surya Mahesa and Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di

Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis”, *Jurnal Media Akademik* 3, No. 9, (September 2025), DOI: 10.62281.

Prawira, I Gusti Bagus Yoga. “Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah.” *Jurnal IUS* 4, no. 1, 2016. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.506>.

Purna Noor Aditama. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.” Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/27746>.

Rachman, Rahmia, Ahmad Aswar Rowa, dan Hasnawati. “Pertanggungjawaban PPAT Atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah.”, *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6671>.

Rila Puspita Wardani, Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Moh.Alfaris, Erwin Widhiandono, “Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijk* Verklaardpada Akta Jual Beli”, *Jurnal Risalah Hukum* 20, No. 1, (Juni 2024): 6, <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1493>.

Robertman, Sander. “Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Titipan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Dilakukan Oleh Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Analisis Putusan Nomor 29/PID.B/2020/PN PWK).” *Jurnal Ikamakum* 4, no. 2, 2024.

Rohendi, Felicitas Sri Marniati, dan Anriz Nazarudin Halim. “Tanggung Jawab Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pembuatan Akta Yang Mengesampingkan Aspek Yuridis Formal.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9, 2023.

https://search.crossref.org/search/works?q=2963-1130&from_ui=yes

SIP Law Firm, “Isi, Makna, dan Ancaman Hukuman Pasal 55” SIP Law Firm, 2023.

Siregar, Fakhrurrozi Farras Al-Husein. “Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika Terjadi Suatu Tindak Pidana.” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3, 2022.

<https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art16>.

Syah, Fina Auliya Rohman. “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara Pidana.” *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 2, 2023.

<https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.403>.

Utama, Muhammad Rafiq. “Kewenangan PPAT dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli.” *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 3, no. 2, 2024.

<https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.43>.

Vinsa Juanda Sari, Ismansyah, & Azmi Fendri, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum”, *Jurnal Niara*, (Januari 2025),
<https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.22259>.

Willa Wahyuni, “Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan”,
Hukumonline.com, 2022.

Zaldy Salim Mhd. Hamid, “Memahami Prosedur Jual Beli hingga Balik
Nama Sertifikat Tanah”, Heylaw.com, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan PPAT

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan PPAT